

# **PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEPENGHULUAN BAGAN MANUNGGAL KECAMATAN BAGAN SINEMBAH TAHUN 2013-2014**

Oleh :

Regina Ayu, Adlin\*

\* Adalah Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

## **ABSTRACT**

Background research problems. In the Rural Development Planning Meeting (Musrenbangdes) aims to accommodate all the aspirations of the community to set priorities according to the needs of community activities in order to overcome the existing problems. The program proposed in Musrenbangdes Chart Manunggal an elite formulation refresentasi only and not based on the level of the priorities and needs of the community so that there are many developments that communities need that should be included in the proposed development plan will be but is not recommended in the proposed development plan. And also the lack of participation of stakeholders and communities in the implementation and lack of socialization Musrenbangdes representatives of government agencies Kepenghuluan about Musrenbangdes. Success or failure in the implementation of Musrenbangdes, can be seen from the quality of Musrenbangdes as well as effective, efficient and keoptimalannya in Musrenbangdes implementation and the factors that affect the implementation of Musrenbangdes.

The purpose of this research is known that in order to know the process of village development planning meeting (Musrenbangdes) chart Manunggal look of the stages Musrenbangdes and the factors that cause not suksesnya development planning Kepenghuluan Chart Manunggal theoretical concepts used are as for the cause of weak governance capacity of villages in village development planning (Asmara Hadi 2001) and the factors that influence the process of preparing the development rencanan villages / wards (Raharjo Adisasmita). The method used is a method of qualitative research study conducted by the descriptive data in the data collection, research using interview techniques, documentation and literature studies using informants as sources of information. Results of this study, a portrait that from the results of the implementation of Musrenbangdes Chart Manunggal said not optimal and maximum efficiency and effectiveness has not been done so that the results Musrenbangdes priotitas not based on

the scale and needs of the community at large so that actually perceived benefits and impacts positively by the public.

Keywords: Planning, Development, Kepenghuluan.

#### ABSTRAK

Latar belakang masalah penelitian. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) bertujuan untuk menampung semua aspirasi masyarakat untuk menetapkan prioritas sesuai dengan kebutuhan kegiatan masyarakat dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada. Program yang diusulkan dalam Musrenbangdes Bagan Manunggal merupakan refresentasi hanya formulasi elit dan tidak berdasarkan kepada tingkat prioritas dan kebutuhan masyarakat sehingga masih banyak pembangunan-pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat yang seharusnya masuk dalam usulan perencanaan pembangunan akan tetapi tidak diusulkan dalam usulan perencanaan pembangunan. Dan juga kurangnya peran serta dari Stakeholders dan juga masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangdes serta kurangnya sosialisasi perwakilan dari aparat pemerintah Kepenghuluan tentang Musrenbangdes. Kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan Musrenbangdes, dapat dilihat dari kualitas Musrenbangdes serta efektif, efisien dan keoptimalannya dalam pelaksanaan Musrenbangdes serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Musrenbangdes.

Tujuan dari penelitian ini diketahui bahwa untuk mengetahui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) bagan Manunggal melihat dari tahapan-tahapan Musrenbangdes dan faktor-faktor yang menyebabkan tidak suksesnya perencanaan pembangunan Kepenghuluan Bagan Manunggal konsep teori yang digunakan adalah adapun yang menyebabkan lemahnya kapasitas pemerintahan desa dalam membuat perencanaan pembangunan desa (Asmara Hadi 2001) dan faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses penyusunan rancangan pembangunan desa/kelurahan (Raharjo Adisasmita). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan studi yang dilakukan oleh data deskriptif dalam pengumpulan data, penelitian menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan studi literatur dengan menggunakan informan sebagai sumber informasi. Hasil penulisan ini menggambarkan bahwa dari hasil pelaksanaan Musrenbangdes Bagan Manunggal dikatakan belum optimal dan maksimal efisiensi dan efektifitas kegiatan belum terlaksana sehingga hasil Musrenbangdes tidak berdasarkan kepada skala priotitas dan

kebutuhan masyarakat banyak sehingga benar-benar dirasakan manfaat serta dampaknya secara positif oleh masyarakat.

Kata Kunci:Perencanaan, Pembangunan, Kepenghuluan

## **PENDAHULUAN**

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pembangunan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat <sup>1</sup>

Otonomi daerah (Otonomi) diartikan sebagai penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan kepada masyarakat melalui pembangunan yang salah satunya dalam perencanaan pembangunan. Sedangkan Didalam Undang-Undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan.

Baik pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.<sup>2</sup> Perencanaan pembangunan menjadi suatu hal yang sangat penting terutama Perencanaan pembangunan ditingkat desa merupakan salah satu cara merumuskan kebutuhan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih baik ditingkat desa. Perencanaan berupaya membumikan berbagai konsep pembangunan seperti pembangunan partisipatif, pembangunan berbasis kebutuhan dasar, pembangunan berbasis rakyat, manajemen berbasis masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Konsep ini menempatkan masyarakat lapisan bawah sebagai perencana dan penentu kebijakan di tingkat lokal. <sup>3</sup> Seperti di tingkat lokal yaitu Pemerintahan Kepenghuluan berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No 08 Tahun 2009 Tentang Pembangunan Kawasan Kepenghuluan.

Menjelaskan bahwa Pemerintahan Kepenghuluan merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kepenghuluan dan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPK) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>2</sup> Undang-Undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

<sup>3</sup> Wahjudin Sampeno, 2011. Perencanaan desa terpadu (konsep, kerangka kerja dan praktek dalam penyusunan rencana pembangunan desa di Indonesia. Banda aceh- Indonesia: Read (Reinforcement Action and Develepment. Halaman: 32-34.

yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2007 dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa dalam pengertian musyawarah perencanaan pembangunan desa yang selanjutnya disebut MUSRENBANGDES adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) tahun dan 1 (satu) tahunan.<sup>5</sup>

Dalam Musrenbang perencanaan dari tingkat desa (Musrenbangdes), Kecamatan (Musrenbangcam), Kabupaten/Kota (Musrenbangda) hingga level Nasional dilakukan melalui musyawarah. Musrenbang merupakan salah satu wahana yang bertujuan mengoptimalkan keterlibatan masyarakat.

Tahapan-tahapan atau mekanisme musrenbang desa adalah sebagai berikut:

Pengorganisasian Musrenbang, terdiri dari kegiatan-kegiatan:

- a. Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM)
- b. Pembentukan Tim Pemandu Musrenbang desa oleh TPM (2-3 orang)
- c. Persiapan teknis pelaksanaan Musrenbang desa yaitu:
  - 1) Penyusunan jadwal dan agenda Musrenbang desa
  - 2) Pengumuman kegiatan Musrenbang desa dan penyebaran undangan kepada peserta dan narasumber (minimal 17 hari sebelum hari-H)
  - 3) Mengkoordinir persiapan logistik (tempat, konsumsi, alat dan bahan).

Hani Handoko (1984) dalam M Arifin (2007) menyatakan dua alasan dasar mengapa perencanaan diperlukan, yaitu: (a) perencanaan dilakukan untuk mencapai "*protective benefits*" yang dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan; dan (b) perencanaan dilakukan untuk mencapai "*positive benefits*" dalam bentuk meningkatnya sukses pencapaian tujuan organisasi.<sup>6</sup>

Dalam Pelaksanaan Musrenbangdes sangat berkaitan dengan Kapasitas dan kinerja desa dalam pemerintahan dan pembangunan merupakan komponen penting dalam kemandirian desa. Banyak pihak, termasuk pemerintah desa, selalu menyebut kapasitas merupakan komponen sentral kemandirian desa, tetapi mereka selalu mengatakan bahwa kemampuan desa sangat terbatas, sehingga yang terjadi adalah ketergantungan desa kepada pemerintah.<sup>7</sup> Imposisi hadir dalam bentuk kebijakan, regulasi maupun program paket dari atas, mulai *Desa Membangun Indonesia* dari aturan ADD yang sangat rigid sampai dengan pembentukan BUMDesa secara serentak dan seragam di seluruh desa.

Penentuan program pembangunan oleh masyarakat yang bersangkutan merupakan bentuk mekanisme perencanaan dari bawah, dari akar rumput atau *bottom-up planning*. Peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu

---

<sup>4</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Roka Hilir No 08 Tahun 2009 Tentang Pembangunan Kepenghuluan.

<sup>5</sup> Permendagri No 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

<sup>6</sup> *ibid.*, Wahjudin sampeno.

<sup>7</sup> Sutero Eko. Dkk, 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD). Halaman: 131

bentuk pemberdayaan masyarakat (sosial empowering ) secara nyata dan terarah.<sup>8</sup> Beberapa produk perencanaan desa antara lain Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Perencanaan pembangunan desa merupakan suatu panduan atau model penggalian potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitik beratkan pada peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan.

Konsep ini dilandasi oleh nilai-nilai dan semangat gotong royong yang telah mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia.<sup>9</sup> Dan dengan aktor-aktor maupun pelaku-pelaku yang terlibat dalam perencanaan pembangunan di desa seperti Kepala Desa, perangkat desa seperti Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPK), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kepala Dusun, RT/RW, perwakilan perempuan, perwakilan pemuda, tokoh agama dan Tokoh Masyarakat.<sup>10</sup>

Merujuk pada hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh William Ramphel pada tahun 2003, diidentifikasi beberapa keterbatasan pengembangan kapasitas pemerintahan daerah termasuk pemerintahan desa dinegara-negara berkembang antara lain:

- a. Tidak memadainya infrastruktur dan penataan kelembagaan pemerintahan daerah dan desa, meskipun sudah tersedia infrastruktur yang memadai di beberapa daerah, namun pemerintahan daerah belum mampu mengoptimalkan system yang sudah dibangun untuk menghasilkan pelayanan yang prima, hal tersebut sangat tergantung dari kucuran anggaran yang ketersediaannya sangat terbatas. Kondisi demikian diperkeruh dengan adanya hubungan antar struktur pemerintahan daerah (Kabupaten, Kecamatan dan Desa) yang kurang solid, sehingga keberadaan mereka tidak dalam kondisi yang sinergis dan cenderung mementingkan kepentingan unit kerjanya sendiri.
- b. Lemahnya dalam mengelola kapasitas yang tersedia, sebagian besar pemerintahan daerah (Kabupaten, Kecamatan dan Desa) belum mampu membangun sistem dan prosedur kerja internal unit kerja secara memadai.
- c. Kurangnya motivasi dari pemerintahan daerah (Kabupaten, Kecamatan dan Desa) untuk mengembangkan kapasitas daerahnya masing-masing.<sup>11</sup>

Dalam konteks ini permasalahan yang terjadi di Kepenghuluan Bagan Manunggal yaitu masih rendahnya kemampuan sumber daya manusia dan kekeliruan Kepala Desa, perangkat desa serta lembaga-lembaga pemerintahan desa dalam menemukan dan merumuskan serta mengusulkan pembangunan- pembangunan yang menjadi kebutuhan dari masyarakat Bagan Manunggal seperti sarana dan prasarana yang dibutuhkan di Kepenghuluan Bagan Manunggal.

Dalam hal ini Penghulu Bagan Manunggal sebagai penanggungjawab penuh pembangunan Kepenghuluan Bagan Manunggal belum mampu melakukan pengelolaan serta pembuatan usulan Perencanaan secara maksimal dan optimal

---

<sup>8</sup> Ibid., Halaman: 47-48

<sup>9</sup> *Op.Cit.*, Perencanaan desa terpadu.

<sup>10</sup> *Op.Cit.* Undang-undang no 25 tahun 2004. Sppn.

<sup>11</sup> Suryanto, S. Sos. M.Si. Dkk. 2009. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa. Jakarta: Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah- Lembaga Administrasi Negara. Halaman: 28-30.

yang mana seperti usulan perencanaan pembangunan di tingkat Kepenghuluan seperti Kepenghuluan-kepenghuluan lain yang ada di Kecamatan Bagan Sinembah. Sebagaimana kepala desa dan perangkat desa dituntut untuk dapat melakukan atau membuat usulan perencanaan semaksimal dan seoptimal mungkin yang mana segala bentuk kebutuhan dari masyarakat mampu untuk dirumuskan dalam usulan perencanaan pembangunan Desa.

Jika dilihat dari Kepenghuluan Bagan Manunggal yang belum melakukan perencanaan pembangunan secara maksimal dan optimal tidak berdasarkan kebutuhan yang sangat diprioritaskan dan juga sulit menemukan permasalahan yang ada sehingga menghasilkan sedikit usulan perencanaan pembangunan jika dibandingkan dengan Kepenghuluan yang membuat usulan perencanaan yang berlebihan. Maka disini dikatakan pentingnya usulan perencanaan pembangunan agar setiap aparat Kepenghuluan agar mampu melaksanakan dan membuat perencanaan pembangunan yang baik dan juga harus mengetahui pembangunan-pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat demi untuk kesejahteraan dan kemajuan sarana dan prasarana Kepenghuluan tersebut.

Berdasarkan data dan fenomena-fenomena diatas bahwa Penghulu dan aparat pemerintahan Kepenghuluan beserta masyarakat Kepenghuluan Bagan Manunggal dalam menyelenggarakan dan melaksanakan usulan perencanaan pembangunan kurangnya mampu untuk merumuskan dan menemukan permasalahan pembangunan-pembangunan yang dibutuhkan di Kepenghuluan tersebut. Dan juga dapat dilihat bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan.

Penghulu Bagan Manunggal belum mampu membina dan mengayomi masyarakatnya dalam kegiatan sosial, budaya ataupun terlibat dalam kegiatan masyarakat setempat, dan juga lemahnya kapasitas pemerintahan Kepenghuluan dalam membuat usulan perencanaan pembangunan Kepenghuluan. Dan juga Lemahnya kerjasama dalam melaksanakan dan menyelenggarakan perencanaan pembangunan Kepenghuluan bersama lembaga dan komponen masyarakat. Serta Kurangnya sosialisasi perwakilan dari aparat pemerintah baik di tingkat Kepenghuluan, Kecamatan maupun tingkat Kabupaten/Kota tentang pentingnya musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) terhadap pemerintahan Kepenghuluan masalah pembangunan yang akan dibahas di tingkat Kepenghuluan.

Dapat dilihat dari gejala-gejala diatas bahwa masih lemahnya kemampuan aparat pemerintahan Kepenghuluan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Untuk itu penulis beranggapan bahwa masih ada kekurangan-kekurangan baik itu keefektifitasnya, keefesiennya, serta kemaksimalan dalam memperoleh hasil perencanaan yang baik.<sup>12</sup> Dan dari data dan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kepenghuluan Bagan Manunggal dengan judul: “ *Perencanaan Pembangunan Kepenghuluan Bagan manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Tahun 2013-2014* ”

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif Kualitatif. Metode Deskriptif Kualitatif menurut Kirk dan Milner (1998:9) penelitian kualitatif

---

<sup>12</sup> Ibid., Halaman: 76

adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Menurut Bungin (2009: 68) format deskriptif kualitatif pada umumnya dilakukan pada penelitian dalam bentuk studi kasus. Format deskriptif kualitatif studi kasus tidak memiliki ciri seperti air (menyebarkan di permukaan) tetapi memusatkan diri pada unit tertentu dari berbagai fenomena.

Lokasi penelitian ini adalah di Kepenghuluan Bagan Manunggal salah satu Kepenghuluan yang ada Kecamatan Bagan Sinembah yang terletak di Kabupaten Rokan Hilir

Penelitian ini menggunakan Jenis dan Sumber Data:

**a. Jenis Data**

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber berupa informasi dari hasil proses wawancara dan informasi penelitian yang telah ditetapkan dalam penelitian serta didukung dengan data observasi yang dilakukan penulis. Data inilah yang dijadikan rujukan penulis dalam mendeskripsikan tentang apa yang menyebabkan lemahnya pemerintah Kepenghuluan Bagan Manunggal dalam membuat perencanaan pembangunan tahun 2013-2014.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yang dimaksud adalah data informasi dan keterangan lainnya yang diperlukan untuk menyusun penelitian guna menjelaskan permasalahan yang diteliti data tersebut diperoleh di Kantor Penghulu Bagan Manunggal, Kantor Camat Bagan Sinembah, Antara lain:

1. Data tentang jumlah penduduk
2. Data tentang keadaan lokasi penelitian.
3. Data Keadaan wilayah.
4. Keadaan sarana dan prasarana
5. Data tentang keadaan sosial ekonomi masyarakat
6. Data perencanaan pembangunan tahun 2013-2014
7. Data realisasi pembangunan tahun 2013-2014.

**b. Sumber Data**

1. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang memberikan keterangan. Informan adalah suatu istilah yang memberikan pengertian kepada seseorang atau subjek yang bertugas memberikan data dalam bentuk informasi yang ia ketahui. Dalam teknik penelitian kualitatif ini teknik sampling yang sering digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu, teknik pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu. Dimana pertimbangan tertentu misalnya orang yang dianggap paling tahu terhadap permasalahan yang diteliti, atau mungkin orang yang dianggap paling menguasai sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.

Dalam hal ini yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Camat Bagan Sinembah, Penghulu, Sekretaris Penghulu, Kepala Urusan Pembangunan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPK), Kepala Dusun, RT/RW dan Tokoh Masyarakat.

Analisa data dilakukan dengan cara,

Karena penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif, maka untuk analisa data menggunakan teknik analisa data kualitatif menurut *Lexy. J. Moleong* adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menentukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Setelah memperoleh data yang diperlukan, maka semua data dan informasi yang diperoleh ditabulasi, diklasifikasikan, dianalisis dan disimpulkan jenisnya dengan menggunakan analisa kualitatif dalam bentuk uraian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada masalah penelitian dilatar belakang, yaitu bahwa pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa di Kepenghuluan Bagan Manunggal ternyata belum sesuai dengan harapan dan tujuan yang diinginkan. Hal ini salah satunya dikarenakan bahwa masyarakat belum terlibat sepenuhnya dalam penentuan perencanaan pembangunan baik ditingkat rukun warga, rukun tetangga, maupun tingkat desa. Sehingga usulan yang ada hanya perumusan dari keterwakilan saja sehingga output dari usulan-usulan yang ada, belum efektif yang direncanakan dalam Musrenbangdes.

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembnagunan Desa (Musrenbangdes), peranan penting pemerintah desa, *stakeholder* dan masyarakat sangat menentukan keberhasilan program yang direncanakan. Sehingga dengan kerja sama unsur tersebut dapat menstrukturkan permasalahan yang terjadi disekitar dan mekanisme penanganannya. Adapun proses musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) di Kepenghuluan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah yaitu sebagai berikut:

### **1. Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbangdes (TPM)**

Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbangdes merupakan kegiatan Pra-Musrenbangdes yang bertujuan untuk mempersiapkan tim penyelenggara Musrenbangdes dan segala sesuatu yang diperlukan pada saat Musrenbangdes. Kemampuan merupakan langkah pertama dalam membuat perencanaan sehingga dalam pelaksanaannya nanti menjadi terarah sesuai dengan tujuan dan hasil yang ingin dicapai. Dalam melaksanakan Musrenbangdes ini masih adanya kekurangan- kekurangan dalam persiapan. Disini dalam Pembentukan Tim Penyelenggara musrenbangdes (TPM) dan juga dalam memilih tim pemandu. Yang sama sekali tidak dilakukan oleh aparat pemerintahan Kepenghuluan sebelum pelaksanaan Musrenbangdes.

### **2. Sosialisasi**

Sosialisasi merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Melalui sosialisasi akan membantu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang program atau kegiatan pembangunan masyarakat yang telah direncanakan. Proses sosialisasi menjadi sangat penting karena akan menentukan minat atau keterkaitan masyarakat untuk berpartisipasi (berperan atau terlibat) dalam program



pemberdayaan masyarakat yang dikomunikasikan.<sup>13</sup> Bahwa pemerintah Kepenghuluan Bagan Manunggal harus lebih aktif dalam melakukan sosialisasi secara terbuka kepada masyarakat tentang pelaksanaan Musrenbangdes sehingga anggota masyarakat dengan lebih mudah memahami dan mengetahui pelaksanaan Musrenbangdes.

### 3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dusun (Musrenbangdus)

Musrenbangdus adalah kegiatan musyawarah yang dilakukan ditingkat dusun guna mengetahui apa yang menjadi persoalan kebutuhan pembangunan di tingkat dusun dengan membuka kesempatan dari tiap-tiap RT dan RW dan juga masyarakat untuk menyampaikan persoalan-persoalan atau aspirasi-aspirasi masyarakat yang ada di RT dan RW masing-masing. Di Kepenghuluan Bagan Manunggal itu sendiri dalam pelaksanaan Musrenbangdus berdasarkan perintah dari aparat pemerintah desa yang disampaikan secara langsung kepada kepala dusun untuk dapat melakukan Musrenbangdus terlebih dahulu sebelum pelaksanaan Musrenbangdes di tingkat desa memang sama sekali tidak terselenggara oleh pemerintah tiap-tiap dusun.

### 4. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) adalah suatu kegiatan formal yang dilakukan ditingkat pemerintahan desa yang mana didalamnya terdapat musyawarah mengenai perencanaan pembangunan desa untuk menemukan dan merumuskan persoalan-persoalan pembangunan atau untuk manampung kebutuhan-kebutuhan pembangunan dari masyarakat desa, yang dilakukan oleh pemerintah desa, organisasi-organisasi desa, tokoh masyarakat dan anggota masyarakat. Untuk mengetahui seberapa jauh perencanaan program yang dirumuskan itu telah “baik” bahwa dalam pelaksanaan musrenbangdes pemerintah desa sudah mempersiapkan semaksimal mungkin untuk dapat berjalan dengan lancar acara musrenbangdes tersebut akan tetapi, masih banyak kendala-kendala maupun hambatannya seperti masih minimnya dana dan juga rendahnya tingkat kehadiran baik aparat pemerintah Kepenghuluan maupun anggota masyarakat.

Pemberdayaan, pada hakikatnya adalah untuk menyiapkan masyarakat agar mereka mampu dan mau secara aktif berpartisipasi dalam setiap program dan kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup (kesejahteraan) masyarakat, baik dalam pengertian ekonomi, sosial, fisik, maupun mental. Meskipun partisipasi masyarakat merupakan sesuatu yang harus ditumbuh kembangkan pada proses pembangunan, namun didalam praktiknya tidak selalu diupayakan sungguh-sungguh.

Dipihak lain, tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan mensyaratkan adanya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh “pemerintah” kepada masyarakatnya untuk terlibat secara aktif didalam proses pembangunan. Artinya, tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat memberikan indikasi adanya pengakuan (aparat) pemerintah bahwa masyarakat bukanlah sekedar objek atau penikmat hasil pembangunan, melainkan subjek atau pelaku pembangunan yang memiliki kemampuan dan kemauan yang

---

<sup>13</sup> Dr. Aprillia Theresia dan NTP, Msi., 2014, Pembangunan Berbasis Masyarakat, Bandung: Alfabeta, Halaman:220-221.

dapat diandalkan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.<sup>14</sup> Kurang keterlibatan maupun partisipasi masyarakat baik kehadiran Saat didalam forum Musrenbangdes kebanyakan dari masyarakat atau perwakilan dari masyarakat sebagaimana seperti biasanya mereka hanya datang, diam, mendengarkan dan tidak mampu mengeluarkan pendapat mereka.

Dengan kemampuan sumber daya manusia aparatur pemerintah desa merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan pemerintahan desa, artinya dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kepenghuluan Bagan Manunggal kemampuan sumber daya manusia aparatur pemerintah desa masih rendah kualitas dan kemampuannya karena dapat dilihat dari perumusan perencanaan pembangunan masih banyak aparat pemerintah desa yang hanya mengikut-ngikut saja apa yang diputuskan tanpa ada masukan dan komentar dan juga sulitnya untuk menemukan permasalahan dan fakta yang ada dilingkungan desa itu sendiri.

Selama ini di Kepenghuluan Bagan Manunggal aparat pemerintahan Kepenghuluanpun tidak pernah mendapatkan pelatihan khusus mengenai proses perencanaan pembangunan oleh pemerintah Kecamatan maupun Kabupaten. Selama ini pemerintah Kabupaten memang memberikan wewenang kepada pemerintah desa melalui pemerintah Kecamatan untuk dapat melakukan Musrebangdes di tiap-tiap Kepenghuluan tanpa ada campur tangan dari pemerintahan Kabupaten. Akan tetapi pemerintah Kabupaten tidak pernah terpikir untuk memberikan dukungan kegiatan seperti pelatihan dan bimbingan kemampuan pemerintah desa dalam proses perencanaan.

Ini merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pemerintahan desa agar pengetahuan dan kemampuan pemerintahan desa dalam proses musrenbangdes menjadi lebih baik dan mudah untuk dijalankan sehingga menghasilkan perencanaan yang baik. Kemampuan pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut akan menjadi tolok ukur bagi pencapaian kinerja pemerintahan desa.

Artinya, dukungan individu, organisasi, dan sistem yang memadai sangat diperlukan dalam rangka pencapaian kinerja pemerintahan desa. Kemampuan atau kapasitas yang dimiliki oleh aparatur desa (individu) dan kepemimpinan kepada desa diharapkan mampu mengatasi berbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun demikian, keberhasilan pencapaian kinerja pemerintahan desa tidak hanya ditentukan oleh sekretaris desa saja, oleh karenanya tuntutan kemampuan menyelenggarakan pemerintahan desa juga menjadi tanggung jawab kepala desa, para kepala urusan dan anggota BPD, BPK . Berkenaan dengan tersebut, upaya peningkatan kompetensi aparatur desa menjadi penting untuk dilakukan secara terus menerus.

Pertanyaannya adalah, sejauhmana keberhasilan pemerintah dalam mengembangkan kapasitas pemerintahan desa, karena berdasarkan uraian sebelumnya ternyata masih terdapat sejumlah persoalan besar yang terjadi di desa desa. Untuk alasan inilah, nampaknya pemerintah dan pemerintahan daerah perlu segera mengambil langkah-langkah konkret dalam rangka meningkatkan kapasitas atau kemampuan pemerintahan desa, sehingga kedepan desa tidak lagi terpinggirkan seperti yang terjadi pada masa lalu.

---

<sup>14</sup> Op.Cit., Dr Aprillia Theresia dan NTP, M.Si, halaman:206-207.

Desa masa depan adalah desa yang mampu mengelola potensi yang ada berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan desa yang demokratis dan memiliki keunggulan dibidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya.<sup>15</sup> Melihat dan mengamati dari hasil penelitian, maka ada kekurangan- kekurangan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan. Ini menyebabkan bahwa belum optimalnya pelaksanaan perencanaan pembangunan Kepenghuluan sehingga hasilnya pun belum maksimal, efektif, dan efisien. Untuk itu, aparat pemerintah Kepenghuluan sebagai pelaksana harus melakukan langkah-langkah yang konkret guna mengatasi kekurangan dan menjadikan musrenbangdes itu supaya berhasil dengan baik.

Dalam pelaksanaan musrenbangdes perlu diperhatikan kualitas atau kemampuan aparat pemerintahan desa, karena akan berpengaruh pada kualitas hasil perencanaan pembangunan sekarang dan tahun berikutnya sehingga dapat pula berpengaruh pada proses alokasi anggaran untuk usulan yang dibahas dalam musrenbangdes. Selain itu pelaksanaan musrenbangdes penting ditinjau agar pelaksanaan musrenbangdes tidak hanya sebagai formalitas saja. Karena dewasa ini muncul kecenderungan bahwa pelaksanaan musrenbangdes tidak dapat dijadikan tolok ukur perencanaan yang partisipatif dan transparansi (keterbukaan) sehingga output dari pelaksanaan musrenbangdes tersebut kurang sesuai seperti yang diharapkan.

### **Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tidak Suksesnya Perencanaan Pembangunan Di Kepenghuluan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Tahun 2013-2014.**

Adapun Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Lemahnya Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Membuat Perencanaan Pembangunan Desa Menurut Asmara Hadi (2001) Adalah Sebagai Berikut:

1. Lemahnya Kapasitas Lembaga-Lembaga yang Selama Ini Menangani Perencanaan.

Sebagaimana dalam penelitian ini bahwa Kepenghuluan Bagan Manunggal kapasitas ataupun kemampuan lembaga-lembaga pemerintah desa masih sangatlah lemah. Dapat dilihat dari lemahnya pengetahuan lembaga-lembaga LPM, BPK tentang pelaksanaan perencanaan pembangunan dan bahwa pentingnya perencanaan tersebut untuk dapat melangkah lebih baik kedepan dengan awal upaya yang dilakukan yaitu musrenbangdes dan jika dilihat dari pendidikan formal mereka atau pendidikan akhir orang-orang yang menduduki lembaga-lembaga pemerintahan desa tersebut masih rendah rata-rata dari mereka ada yang pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP) sehingga kontribusi yang mereka berikan tidak dapat memenuhi tuntutan yang ada dan akhirnya berdampak kepada hasil yang diberikan.

Selain itu kelemahan kapasitas lembaga-lembaga pemerintah desa yaitu bahwa pada saat didalam forum musrenbangdes terlihat masih kaku lembaga tersebut untuk dapat memberikan masukan dan pendapat mengenai perencanaan pembangunan hanya sedikit dari mereka yang mampu mengeluarkan pendapat sehingga forum musrenbangdes setiap tahunnya hanya dijadikan sebagai kegiatan

---

<sup>15</sup> Op. Cit., Suryanto, S. S.sos, Halaman: 26-27.

formalitas atau rutinitas pemerintah desa saja. Dan juga pada saat didalam forum musrenbangdes bahwa terlihat kurangnya kekompakan antar lembaga satu dengan lembaga yang lain ataupun dengan aparat pemerintah desa itu sendiri baik dalam menetapkan perumusan masalah perencanaan pembangunan, dan penentuan skala prioritas maupun kurangnya kekompakan mereka untuk dapat hadir dalam forum.

## 2. Kelemahan Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan upaya untuk merumuskan hal-hal yang tidak dikahendaki atau faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya keadaan yang tidak dikahendaki. Identifikasi masalah, dapat dilakukan dengan menganalisis kesenjangan:

1. Antara data-potensial dengan data aktual
2. Antara keadaan yang ingin dicapai dengan yang sudah dicapai.
3. Antara teknologi yang seharusnya dilakukan/diterapkan dengan yang sudah diterapkan.
4. Antara peraturan yang harus dilaksanakan/diberlakukan dengan praktik atau kenyataan yang dijumpai dalam penerapan peraturan-peraturan tersebut.

keadaan atau kondisi serta masalah-masalah yang ada dilingkungan sekitarnya baik berdasarkan dari hasil analisis fakta dan keadaan, biasanya menghasilkan berbagai masalah (baik masalah yang sudah dirasakan maupun belum dirasakan masyarakat setempat) sehubungan dengan hal ini, perumusan masalah perlu dipusatkan pada masalah-masalah nyata (*real-problms*) yang telah dirasakan masyarakat (*felt-problems*) artinya, perumusan masalah hendaknya dipusatkan pada masalah-masalah yang dinilai sebagai penyebab tidak terpenuhinya kebutuhan nyata (*real-needs*) masyarakat, yang telah dapat dirasakan (*felt-needs*) oleh mereka.

Berkenaan dengan itu, setiap perumusan program harus sejauh mungkin mengajak mereka untuk mengemukakan kebutuhan-kebutuhannya, tujuan yang diharapkan, serta alternatif-alternatif pemecahan masalah atau pemilihan kegiatan yang pemecahan masalah mereka inginkan. Sebagaimana yang terjadi di kepenghuluan Bagan Manunggal bahwa terdapat kelemahan identifikasi masalah pada forum musrenbangdes oleh aparat pemerintah desa itu sendiri sulitnya untuk menemukan dan merumuskan prioritas pembangunan yang ada dilingkungan sekitarnya yang akan menjadi usulan perencanaan pembangunan.

Seharusnya aparat pemerintah desa ataupun lembaga-lembaga pemerintah desa mengetahui dengan benar apa saja yang menjadi permasalahan pembangunan didesanya sendiri.

## 3. Dukungan Data dan Informasi Pemerintahan Yang Lemah

Data dan informasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan karena setiap informasi harus didukung dengan sebuah data agar informasi tersebut dapat dikatakan fakta maka sebuah data sangat diperlukan dan data merupakan hal sangat penting karena tanpa adanya suatu data maka belum dapat sesuatu itu dikatakan fakta yang ada dilapangan. program yang baik, harus mengungkapkan hasil analisa fakta dan keadaan yang lengkap yang menyangkut keadaan, sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan tersedianya

sarana dan prasarana dan dukungan kebijaksanaan, keadaan sosial, stabilitas politik. Untuk keperluan data dan informasi tersebut dapat dilakukan oleh lembaga/aparat pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat dan organisasi.

Data dan informasi diperlukan guna mengetahui dan lebih memudahkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan dengan data dan informasi maka akan diketahui apa saja yang sangat diperlukan baik itu data tentang perencanaan pembangunan. Seperti data dan informasi tentang perubahan yang terjadi di masa lampau ke masa sekarang, dan kecenderungan ke masa depan serta dilengkapi dengan penyebab terjadinya perubahan-perubahan tersebut dan dengan adanya suatu informasi maka akan lebih mudah mengetahui apa yang belum kita ketahui. dengan tujuan agar menghasilkan perencanaan yang sesuai dengan tuntutan.

Masih belum tersedianya data yang akurat mengenai potensi alam dan manusia (SDM) serta sarana dan prasarana yang ada di setiap Dusun sehingga dalam pelaksanaan Musrenbangdes seringkali tidak mendapatkan dukungan data yang akurat. Keadaan ini dapat menjadi hambatan dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Bahwa lemahnya data dan informasi pemerintahan Kepenghuluan yang membuat salah satu penyebab tidak suksesnya perencanaan pembangunan kepenghuluan Bagan Manunggal dikarenakan pemerintahan Kepenghuluan belum mampu mengumpulkan data yang ada di lapangan dan juga sulitnya untuk mendapatkan informasi yang ada di lapangan mengenai pembangunan karena kurangnya kegigihan dan kemauan serta kahendak aparat pemerintah Kepenghuluan untuk mengetahuinya.

#### 4. Kualitas Sumber Daya Manusia Desa Yang Lemah.

Seperti halnya pada setiap aktivitas/kegiatan, baik yang dilaksanakan oleh individu maupun organisasi/ kelompok, sumber daya manusia selalu menjadi faktor utama sebagai "motor" penggerak. Begitu pula halnya dengan proses perencanaan pembangunan. Perencana selaku Sumber Daya Manusia (SDM) perencanaan merupakan faktor utama yang menggerakkan pelaksanaan perencanaan. Sebagai motor penggerak perencanaan, SDM perencanaan menjadi sangat penting dan bahkan menjadi kunci bagi berhasil tidaknya proses perencanaan pembangunan. Kualitas perencanaan yang baik akan lebih memungkinkan terciptanya oleh SDM yang tepat dan berkualitas, sementara itu perencanaan yang lebih memungkinkan untuk dapat diimplementasikan dalam program-program pembangunan.

Dengan demikian kualitas perencanaan yang baik sangat tergantung pada kemampuan, keahlian, dan keluwesan dari para perencananya.<sup>16</sup> Seperti perencanaan Pembangunan desa yaitu didalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes). Sumber Daya Manusia (SDM) desa (kepemimpinan). Terbatasnya pengetahuan, kemampuan keterampilan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat. Kepemimpinan kepala desa menjadi faktor penting bagi keberhasilan

---

<sup>16</sup> Ruyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah, 2005, Perencanaan Pembangunan Daerah (Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah), Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Halaman: 24- 25.

penyelenggaraan pemerintahan desa, karena kepala desa menjadi ‘‘lokomotif’’ bagi akselerasi atau percepatan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu mekanisme pemilihan kepala desa diharapkan menjadi pintu gerbang untuk memilih kepala desa yang berkualitas.<sup>17</sup> Seperti halnya yang terjadi di kepenghuluan Bagan Manunggal bahwa masih rendahnya sumber daya manusia desa baik itu kepala desa, perangkat desa, BPD dan LPM dapat dilihat dari pendidikan akhir yang mana mayoritas aparat pemerintah desa pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA)

#### 5. Lemahnya dukungan kegiatan pendamping didalam perencanaan

Dukungan kegiatan pendamping merupakan kegiatan-kegiatan baik yang bersifat formal maupun non- formal yang diselenggarakan, baik itu aparat pemerintah Kepenghuluan, Kecamatan, maupun pemerintahan Kabupaten seperti kegiatan-kegiatan pelatihan, bimbingan dan kegiatan yang mensosialisasikan tentang pelaksanaan Musrenbangdes dengan tujuan agar pemerintah desa mengetahui tentang pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) agar penyelenggaraan Musrenbangdes dapat berjalan dengan baik sesuai prosedur yang ditentukan. Akan tetapi lain halnya dengan di Kepenghuluan Bagan Manunggal bahwa masih lemahnya dukungan kegiatan pendamping mengenai perencanaan yang ada di Kepenghuluan tersebut baik itu kegiatan formal maupun non-formal mengenai kegiatan perencanaan pembangunan baik yang disediakan atau difasilitasi oleh pemerintah Kepenghuluan, Kecamatan, maupun pemerintahan kabupaten.

#### 6. Lemahnya Dukungan Pendanaan Untuk Kegiatan Iuran Perencanaan.

Anggaran atau dana merupakan hal yang sangat penting jika ingin menyelenggarakan suatu kegiatan karena tanpa adanya dana atau minimnya dana maka suatu kegiatan tersebut tidak dapat terselenggara dengan baik seperti halnya dalam menyelenggarakan kegiatan Musrenbangdes memerlukan dana dan anggaran yang cukup agar dapat memfasilitasi segala peralatan dan perlengkapan dalam perencanaan yang diperlukan jika tidak terpenuhi maka perencanaan tidak dapat terselenggara dengan baik. Bahwa masih minimnya pendanaan untuk kegiatan iuran perencanaan baik itu dana dari Kepenghuluan maupun dana iuran dari aparat pemerintahan Kepenghuluan karena sulitnya untuk mengumpulkan dana dari aparat pemerintahan Kepenghuluan sehingga terdapat banyak kekurangan dari segi peralatan dan perlengkapan dalam Musrenbangdes.

Selanjutnya menurut Raharjo Adisasmita adapun faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses penyusunan rencana pembangunan desa sehingga program yang diusulkan tidak semua disetujui, disebabkan oleh:

#### 1. Lemahnya Sumber Daya Tenaga Perencanaan di Tingkat Desa/ Kelurahan

Sumber daya tenaga dapat dilihat dari bentuk keterlibatan maupun partisipasi dari aparat pemerintah desa, lembaga-lembaga pemerintahan desa serta masyarakat untuk menghadiri maupun ikut terlibat dalam forum Musrenbangdes. Dengan meluangkan dan memberikan tenaga, waktu, kesempatan dan mau meninggalkan aktivitas yang biasa dilakukan sehari-hari untuk menghadiri pelaksanaan Musrenbangdes.

---

<sup>17</sup> Op. Cit., Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa, Halaman 34.

Karena sumber daya tenaga dari mereka sangat diperlukan yaitu keterlibatan dalam forum Musrenbangdes dengan ikut berpartisipasi dan juga mampu untuk mengeluarkan argumen-argumen serta pendapat dengan satu tujuan dan menunjukkan suatu kekompakan maka barangkali usulan program pembangunan akan dapat diterima dan mudah untuk masuk dalam usulan begitupun sebaliknya jika partisipasi rendah dan tidak mampu merespon serta mengeluarkan argumen maupun pendapat maka adapun usulan program yang ingin dirumuskan barangkali sulit untuk diterima.

Sebagaimana di Kepenghuluan Bagan Manunggal masih dikatakan lemahnya sumber daya tenaga dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan seperti keterlibatan maupun partisipasi baik oleh aparat pemerintah Kepenghuluan, lembaga-lembaga pemerintahan Kepenghuluan serta anggota masyarakat untuk dapat meluangkan dan memberikan tenaga serta waktu dan kesempatan untuk melibatkan diri dalam pelaksanaan Musrenbangdes

## 2. Terbatasnya Waktu

Waktu merupakan sesuatu yang sangat penting dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan karena waktu sangat diperlukan untuk mengukur keefektifan perencanaan. Dengan waktu yang cukup kita bisa melakukan dan membahas perencanaan pembangunan dengan baik. Keterbatasan waktu menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam proses penyusunan rencana pembangunan di Desa/Kelurahan karena dengan waktu yang sedikit dan terbatas maka sulit untuk membahas dan merumuskan serta menyetujui program yang diusulkan. Dalam pelaksanaan Musrenbangdes di Kepenghuluan Bagan Manunggal dilihat dari segi waktunya sangat terbatas.

## 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Mengikuti Program Tahun Lalu

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau disingkat dengan Bappeda, adalah lembaga teknis daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Gubernur/ Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan.

Akan tetapi Banyak pihak, baik dikalangan negara-negara yang sudah maju maupun dilingkungan negara-negara yang sedang berkembang yang sudah lama terlihat dalam diskusi tentang dimana kedudukan yang paling tepat dari suatu badan sentral yang bertanggungjawab melakukan perencanaan. Dikatakan bahwa dimanapun letak kedudukan badan perencanaan ditempatkan, jalur pertanggungjawabannya adalah langsung kepada kepala pemerintahan. Dalam hubungan ini para ahli administrasi pembangunan nampaknya tidak mengalami kesulitan untuk menyepakati bahwa suatu badan perencanaan pembangunan, karena sifat tugasnya fungsional seyogyanya merupakan organisasi yang kecil akan tetap dengan tingkat profesionalisme dari para perencana yang tinggi dengan integritas yang terjamin.

Kecilnya organisasi perencanaan pembangunan berangkat dari pendapat bahwa suatu badan perencanaan memang tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya operasional karena kegiatan operasional diserahkan kepada satuan kerja yang sifatnya dapat sektoral. Dalam pelaksanaan Musrenbangdes di Kepenghuluan

Bagan Manunggal baik itu ditahun-tahun yang lalu hingga sekarang bahwa tidak terlibatnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Musrenbangdes.

#### 4. Perencanaan Yang Tidak Terintegrasi.

Pembangunan berorientasi pada masyarakat berarti hasil pembangunan yang akan dicapai akan bermanfaat dan berguna bagi masyarakat setempat, berbagai bentuk partisipasi masyarakat didalam perencanaan program pembangunan dapat dibentuk atau diciptakan. Hal ini sangat tergantung pada kondisi masyarakat setempat baik kondisi sosial, budaya, ekonomi, maupun tingkat pendidikannya. Dalam menetapkan program pembangunan harus mendapatkan sejumlah usulan program pembangunan yang sudah disepakati apabila ternyata diperlukan perubahan atau perbaikan atas kesepakatan yang telah diambil rangkaian proses ini harus diulangi lagi, sehingga seluruh masyarakat merasa hasratnya telah ditampung dan pada akhirnya mereka akan merasa memiliki hasil dari perencanaan pembangunan tersebut.

Perencanaan yang terintegrasi ataupun perencanaan yang terpadu memiliki beberapa indikator yaitu adanya suatu tujuan bersama, adanya keterkaitan antar sasaran dalam pencapaian tujuan bersama, adanya satu kesatuan wilayah, keterkaitan antar input sumber daya, keterkaitan antar output kegiatan, penerapan pendekatan sistem berkelanjutan, pengelolaan masing-masing unsur secara efisien dan efektif. Apabila indikator-indikator tersebut dapat dilakukan pada saat Musrenbangdes maka akan menghasilkan perencanaan pembangunan yang terintegrasi. Sebaliknya perencanaan pembangunan yang terjadi di Kepenghuluan Bagan Manunggal bahwa dilihat dari hasilnya belum menerapkan indikator-indikator perencanaan yang terintegrasi sehingga diperoleh hasil yang tidak maksimal dan efisien maka dari itu dinilai perencanaan tersebut tidak terintegrasi.

#### 5. Pengalokasian Proyek Tidak Efektif dan Tidak Berdasarkan Skala Prioritas.

Pembangunan yang efektif, bukanlah semata-mata karena adanya kesempatan, tetapi merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan kegiatan, bukan hasil ‘*trial and error*’ tetapi akibat dari perencanaan yang baik karena itu perlu untuk selalu diingat bahwa, kegiatan perencanaan pembangunan yang efektif harus melalui perencanaan program/kegiatan yang baik. Dengan kata lain, pembangunan yang baik harus direncanakan sebaik-baiknya. Sebagaimana pengertian perencanaan itu sendiri diantara sebagai suatu proses pemilihan dan menghubungkan-hubungkan fakta serta menggunakannya untuk menyusun asumsi-asumsi yang diduga bakal terjadi dimasa mendatang, untuk kemudian merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan demi tercapainya tujuan-tujuan yang diharapkan (Terry, 1960) dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta, mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang dikahendaki.<sup>18</sup>

Pembangunan seyogyanya dimulai menemukenali potensi dan kebutuhan dari masyarakat penerima manfaat dan penanggung resiko. Langkah selanjutnya adalah mencari cara dan upaya untuk mewujudkannya. Dengan demikian kegiatan

---

<sup>18</sup> Op. Cit Dr Aprilia Theresia, NTP, M.Si. Dkk, Halaman: 250-251



pembangunan yang mencakup perencanaan beranjak dari keinginan dan kemampuan masyarakat penerima manfaat. Perumusan kebijakan serta pemilihan prioritas yang tajam terpercaya merupakan sarana untuk mengejewantahkan apa yang tercantum dalam perencanaan program pembangunan dukungan masyarakat, terutama masyarakat lokal, dapat dilakukan dengan berperan aktif dalam proses perencanaan. Peran aktif masyarakat dapat berarti berperan langsung dalam berbagai proses politik dan perwakilan, dalam proses perumusan program, peran juga bisa dilakukan secara tidak langsung misalnya dengan pemberdayaan masyarakat (motivator), menjadi penasehat dan juru bicara masyarakat (*advocate*), menjadi penengah antara masyarakat dengan pengambil keputusan (*mediator*), menjadi penyebar informasi dan menjadi tokoh masyarakat informal<sup>19</sup> Sebagaimana hasil dari Musrenbangdes di Kepenghuluan Bagan Manunggal bahwa menunjukkan pengalokasian proyek tidak efektif dan tidak berdasarkan skala prioritas yang mana dari proses perencanaan yang tidak baik tidak sesuai dengan tujuan dan keinginan masyarakat sehingga hasilnya tidak besar manfaatnya bagi masyarakat.

Memang secara umum pengalokasian proyek sangat dipentingkan bagi setiap pembangunan baik yang telah berjalan maupun sedang dan belum berjalan sangat dibutuhkan masyarakat demi memudahkan kelangsungan aktivitas mereka sehari-hari akan tetapi alangkah baiknya dengan penerimaan usulan proyek yang tidak meyeluruh aparat pemerintah Kepenghuluan dan juga bersama lembaga-lembaga pemerintahan Kepenghuluan lebih teliti, jeli dan meilihat fakta serta keadaan yang ada dilingkunagn desa tersebut dalam melihat pembangunan mana saja yang memang sangat dibutuhkan sekali, sehingga akan berdampak kepada pengalokasian proyek tersebut yang dinilai efektif dan berdasarkan skala prioritas.

Sebagaimana usulan pembangunan semenisasi jalan dan pengerasan serta Box cullver yang berada di Dusun Manunggal Makmur khususnya disekitar jalan menuju kantor penghulu dan juga usulan pembangunan Drainase dan puskesmas yang berada Manunggal Jaya. Dan jika dilihat dari tingkat prioritasnya dibandingkan pembangunan yang berusaha diusulkan akan tetapi tidak diterima dan tidak masuk dalam usulan seperti pembangunan semenisasi jalan dan aucas serta renovasi jembatan yang ada di Dusun Manunggal Jaya dan pembangun jembatan yang berada di Dusun Manunggal Makmur yang sangat dibutuhkan yang mana jalan tersebut yang sering dilalui oleh masyarakat maupun masyarakat yang bekerja sebagai petani menuju kekebunnya masing-masing dan juga jembatan yang dilalui mengalami kerusakan. Suatu hal yang perlu diperhatikan dan juga dilihat dari tingkat prioritasnya yaitu sangat dibutuhkan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) serta faktor-faktor yang menyebabkan tidak suksesnya perencanaan pembangunan di Kepenghuluan bagan manunggal kecamatan bagan sinembah, maka pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran bagi pihak yang berkepentingan dan terkait:

---

<sup>19</sup> Op. Cit., Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah. Halaman: 310.

1. pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Bagan Manunggal terdiri dari kegiatan pembentukan tim penyelenggara Musrenbangdes (TPM), sosialisasi, Musrenbangdes dengan tujuan untuk menampung dan mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan yang ada di setiap Dusun, Musrenbangdes dilakukan untuk menjangkau aspirasi dan menyusun arah dan kebijakan. Musrenbangdes di Kepenghuluan Bagan Manunggal dikatakan belum optimal dan belum melakukan perencanaan yang baik karena dapat dilihat dari lemahnya kemampuan aparat pemerintah desa dan juga masyarakat dalam melaksanakan musrenbangdes masih ada kekurangan-kekurangan baik itu kemampuan sumber daya manusia ataupun secara teknis pelaksanaannya dan kinerjanya juga belum optimal belum mengikuti prosedur maupun tahapan Musrenbangdes sehingga hasil yang diperoleh belum efektif, efisien, belum maksimal dan tidak sesuai dengan kebutuhan dan tujuan masyarakat.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak suksesnya perencanaan pembangunan Kepenghuluan Bagan Manunggal yaitu bahwa lemahnya kapasitas lembaga-lembaga yang selama ini menanggapi perencanaan, kelemahan identifikasi masalah, lemahnya dukungan data dan informasi pemerintahan, kualitas sumber daya desa yang lemah, lemahnya dukungan kegiatan pendamping dalam perencanaan, lemahnya dukungan pendanaan untuk kegiatan iuran perencanaan, lemahnya sumber daya tenaga perencanaan, terbatasnya waktu, perencanaan pembangunan yang tidak terintegrasi dan pengalokasian proyek tidak efektif dan tidak berdasarkan skala prioritas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi

- Sunyoto Usman. 2010. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Raharjo Adisasmitha. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta Graha Ilmu
- Riant Nugroho. 2003. *Reinventing Pembangunan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Diana Conyers, 1991, *Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta 2008.
- Raharjo Adisasmitha, 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Taliziduhu Ndraha. 2009. *Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Hagul Peter. 1985. *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*. Cv Rajawali: Jakarta
- Inu Kencana Syafii. 2005. *Pengantar ilmu Pemerintahan*. PT Refika Aditama :Bandung.

- Bintaro Tjokroamidjojo. 1996. *Perencanaan Pembangunan*. Gunung Agung: Jakarta.
- Bugin Burhan. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Media.
- Moleong Ixli J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Suryanto Dkk. 2009. *Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa*. Jakarta: pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah- Lembaga Administrasi Negara.
- Sait Abdullah. Dkk " *Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pelaksanaan Otonomi Daerah* " Jurnal Transformasi Administrasi. Volume I. No.01.2011. Halaman 41-42
- Wahjudin Sumpeno. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu (konsep, Kerangka kerja dan praktek dalam penyusunan rencana Pembangunan des diIndonesia*. Banda Aceh-Indonesia: Read.
- Sutero Eko. Dkk. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan pengembangan pembaharuan desa (FPPD).
- Wisnu Hidayat. *Kebijakan Dan Manajemen Pembangunan Partisipatif*. Yogyakarta Yogyakarta : YPAPI.

### **Skripsi**

- Hadijah. 2009. *Analisis Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Karya Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Riau.
- Akbar Hidayat. 2011. *Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Pelalawan ( Studi Kasus: Kecamatan Langgam Tahun 2012-2013)*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Riau.
- Heri Saputra. 2013. *Dinamika Musrenbang Kecamatan Dalam Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Di Kota Pekanbaru*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Riau.
- Haricha Dwi Randa. 2010. *Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014)*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Riau.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-undang No. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan. Pembangunan Nasional.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No. 08 Tahun 2009 Tentang Pemabangunan Kawasan Kepenghuluan.